

Densus Jangan Langgar HAM

Asas Praduga Tak Bersalah Juga Berlaku bagi Terduga Teroris

JAKARTA, KOMPAS — Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia diingatkan agar jangan melanggar hak asasi manusia dalam menangani sejumlah terduga teroris. Densus 88 juga diminta agar memperhatikan asas praduga tak bersalah para terduga teroris yang mereka tangkap.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan Densus 88 agar memperhatikan asas praduga tak bersalah yang juga berlaku untuk terduga teroris. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang dalam penanganan terorisme.

"Terorisme memang kejahatan luar biasa. Namun, dalam penanganannya tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah. Jangan sampai ada *abuse of power*, apalagi sampai ada pelanggaran HAM," tutur Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Anggota Komisi III DPR, M Nasir Djamil, menyatakan, penanganan terorisme seharusnya dilakukan secara transparan. Selain menghindari kecurigaan publik, penanganan secara terbuka dapat menghindarkan aparat dari tindakan sewenang-wenang dan melanggar HAM.

Menurut Nasir, Densus 88 perlu mencontoh transparansi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang selalu merekam proses pengeledahan rumah atau kantor tersangka korupsi atau mereka yang terkait dengan tersangka. "Sehingga kalau ada yang menyampaikan kecurigaan, Densus 88 tinggal memberikan rekamannya," kata Nasir.

Pernyataan Fadli dan Nasir tersebut menanggapi meninggalnya terduga teroris Siyono setelah ditangkap petugas Densus 88. Siyono yang diduga pimpinan



KOM PAS/VIDELIS JEMALI

Sejumlah anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah berjaga di dekat pintu masuk ruangan jenazah anggota teroris di RS Bhayangkara Palu. Keduanya merupakan anggota kelompok Santoso yang tewas dalam baku tembak dengan anggota Polri-TNI di Desa Talabosa, Kecamatan Lore Piere, Kabupaten Poso, Sulteng, Selasa (15/3). Kelompok itu bergerilya sejak 2007.

Jamaah Islamiyah di Klaten, Jawa Tengah, ditangkap Densus 88 pada 9 Maret lalu.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alvon Kurnia Palma menyatakan, Polri harus memberikan kesetaraan kepada terduga teroris, terutama dalam penyelidikan ketika mereka belum terbukti sebagai teroris. Menurut dia, pemeriksaan terduga teroris tetap harus menghormati HAM.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar mengatakan, penyelidikan kematian Siyono perlu melibatkan pihak eksternal, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Kepolisian Nasional, dan Ombudsman RI. Haris mengatakan, Polri

tidak bisa mengambil alih tugas penegakan hukum sekaligus mengklarifikasi sendiri dugaan kesalahan penanganan prosedur penanganan kasus.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan menyatakan, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri telah memulai penyelidikan dugaan kelalaian anggota Densus 88 sehingga menyebabkan kematian Siyono. Ia menambahkan, Siyono mengalami pendarahan di kepala bagian belakang setelah menyerang anggota Detasemen Khusus 88 dalam perjalanan menuju tempat penyimpanan alat bukti di Prambanan, Yogyakarta.

Aliran dana teroris

Secara terpisah, Ketua Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf meminta pemerintah waspada pendanaan aksi teroris di Indonesia dengan mengidentifikasi dan menelusuri asal sumber dana serta profil penerima dan pengirim. Menurut Yusuf, PPATK telah menerima data dan informasi transaksi keuangan yang mencurigakan dari negara-negara di Timur Tengah, seperti Irak, Suriah, dan Jordania.

Diakui Yusuf, pendanaan terorisme tidak mudah dilacak karena acap kali dilakukan melalui lembaga keuangan remitanasi atau bukan bank. Meski demikian, pola-pola mencurigakan tetap bisa dilacak dengan melihat atau pemberi dan penerima serta pola transaksi keuangannya.

Poso

Kemarin, tim gabungan Polri-TNI baku tembak dengan sejumlah anggota kelompok Santoso di pegunungan Desa Talabosa, Kecamatan Lore Piere, Poso, selatar pukul 07.05 Wita. Dua orang dari kelompok teroris tewas. Keduanya berambut gondrong. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal (Pol) Rudy Sufahriadi belum dapat memastikan bahwa yang tewas adalah Santoso dan orang kepercayaannya, Basri.

Dalam daftar pencarian orang yang dirilis Polda Sulteng dan sejumlah foto serta video yang didapat dari telepon seluler anggota teroris yang tewas diketahui, Santoso dan Basri berambut panjang. (VDL/SAN/NTA/REK)